

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Penyusunan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan.

LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja

dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang , maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, Januari 2019  
Kepala Dinas

**Ir. WAHIDA, M.Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19681130 199403 2 007

## DAFTAR ISI

## SESUAIKAN HALAMAN .....

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
Maksud dan tujuan .....	3
Inovasi Pelayanan Publik .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
Rencana Strategis .....	9
Visi dan Misi .....	9
Tujuan dan Indikator Kinerja .....	10
Sasaran dan Indikator Kinerja .....	12
Program untuk Pencapaian Sasaran .....	14
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	15
Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	16
Rencana Anggaran Tahun 2018 .....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>21</b>

Capaian Kinerja Organisasi .....	21
Capaian Indikator Kinerja Utama 2018 .....	21
Perbandingan Capaian Kinerja .....	24
- Meningkatnya Produksi Mutu dan Nilai Hasil Jual Perikanan Tangkap, Budidaya dan Produk Olahan Ikan	
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	27
Realisasi Anggaran .....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	37
<b>LAMPIRAN</b> .....	39
<b>Daftar Tabel</b>	
Tabel 1. Tujuan dan Indikator Kinerja .....	11
Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja .....	13
Tabel 3 Program Untuk Pencapaian Sasaran .....	15
Tabel 4 Perjanjian Kinerja .....	15
Tabel 5 IKU .....	17
Tabel 6 Rencana Belanja .....	18
Tabel 7 Alokasi Per Sasaran .....	19
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja .....	21
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	23
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Mutu dan Nilai Hasil Jual Perikanan Tangkap, Budidaya dan Produk Olahan .....	25
Tabel 11 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 ....	26

Tabel 12	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 .....	28
Tabel 13	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 .....	30
Tabel 14	Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	32
Tabel 15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	34

**Daftar Gambar**

Gambar 1	Struktur Organisasi .....	6
Gambar 2	Komposisi SDM Berdasarkan Gender .....	7





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan,

permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peran gkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut:

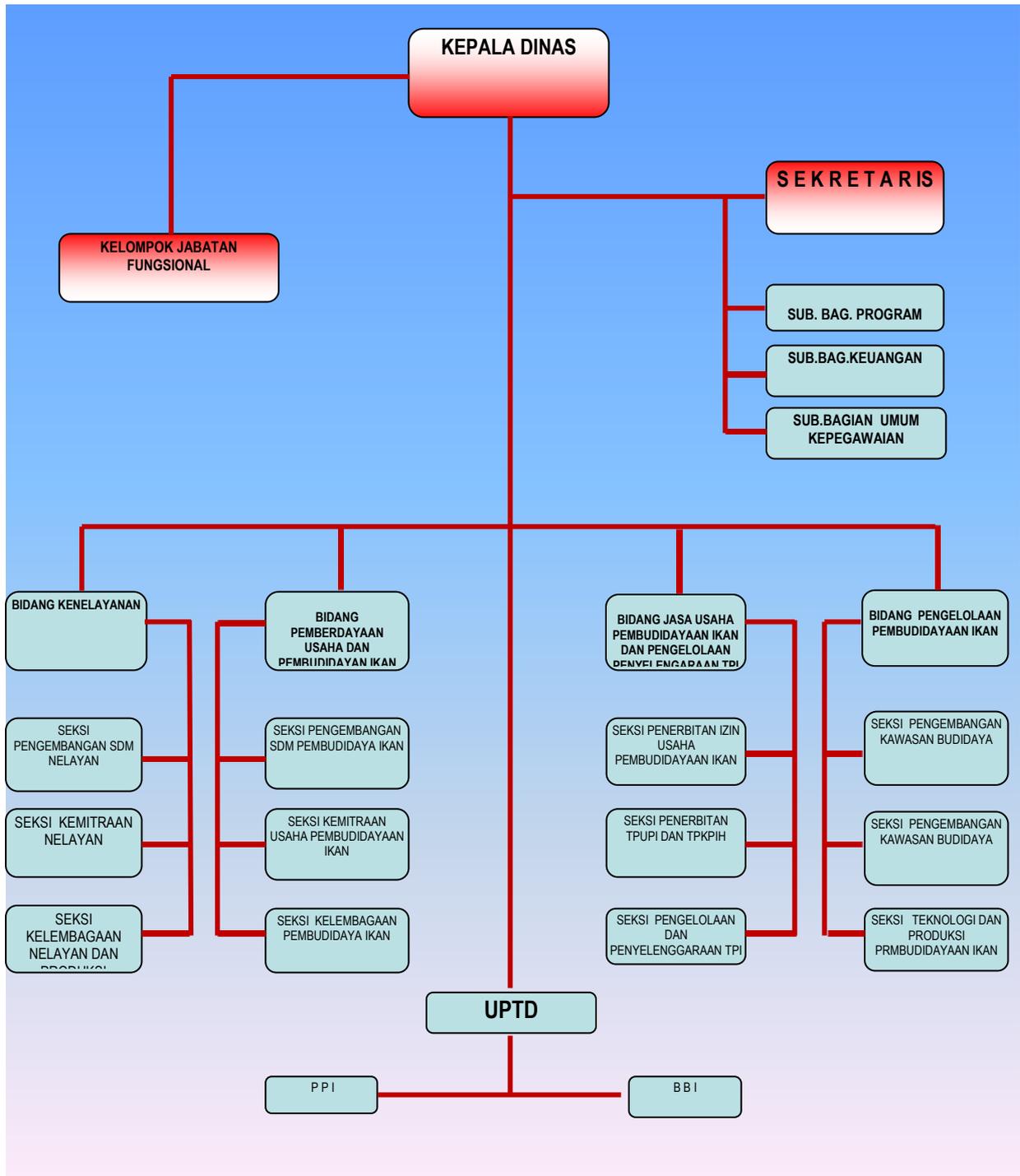
- a) Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone  
Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan Tugas Pembantuan (Dekonsentrasi) yang diserahkan kepada Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- b) Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
  - 1) Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri Kelautan dan Perikanan.

- 2) Memberi bimbingan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan.
  - 3) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
  - 4) Pemberian Izin dan Pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya.
  - 5) Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani.
  - 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.
  - 7) Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- c) Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bonememiliki susunan orgnaisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, dengan 3 (tiga) sub bagian :
  - Sub BagianProgram
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian UmumdanKepegawaian
- 3) Kepala Bidang Kenelayanan, dengan 3 (tiga) seksi :
  - Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Nelayan
  - Seksi Kemitraan Nelayan
  - Seksi KelembagaanNelayandanProduksi
- 4) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan, dengan 3 (tiga) seksi :
  - Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pembudidaya Ikan
  - Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan

- Seksi KelembagaanPembudidayaan
- 5). Kepala Bidang Jasa Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengelolaan Penyelenggaraan TPI, dengan 3 (tiga) seksi :
- Seksi Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan
  - Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkutan Ikan Hidup (TPKPIH)
  - Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
- 6) Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan 3 (tiga) seksi :
- Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya
  - Seksi PengelolaanKesehatanIkandanLingkungan
  - Seksi TeknologidanProduksiPembudidayaanIkan
- 7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan 2 UPTD yaitu :
- PPI
  - BBI



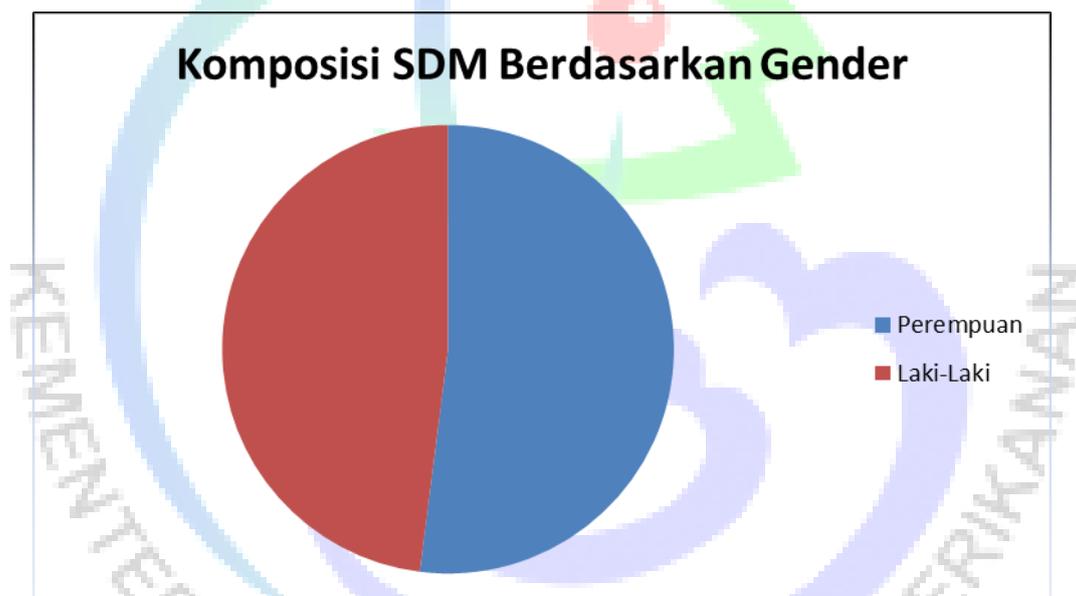
Gambar 1. Struktur Organisasi

Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai berikut :

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone memiliki 85 orang pegawai, yang terdiri dari 49 orang PNS, 36 tenaga kontrak / sukarela. Berdasarkan golongan kepangkatan, sumberdaya aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan cukup memadai yaitu 9 orang merupakan golongan IV, 33 orang merupakan golongan III dan 8 Orang golongan II.

II. Komposisi SDM Berdasarkan Gender :

- Laki-laki sebanyak 24 orang
- Perempuan sebanyak 25 orang



Gambar 2. Komposisi SDM Berdasarkan Gender

### C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

- 1) Masih kurangnya keberdayaan nelayan dan kemandirian pelaku usaha kelautan dan perikanan.

- 2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
- 3) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya, dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan penyakit ikan, serta keterbatasan sarana produksi, dan penerapan teknologi yang masih rendah.
- 4) Menurunnya produksi perikanan tangkap disebabkan perubahan iklim, kerusakan habitat terumbu karang dan mangrove.
- 5) Masih rendahnya mutu hasil perikanan disebabkan penerapan teknologi pengolahan pasca panen yang masih rendah.
- 6) Belum optimalnya penyuluhan perikanan untuk menunjang peningkatan produksi perikanan.

#### **D. INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Pelayanan Terpadu di PPI Lonrae untuk memudahkan nelayan dalam mengurus kelengkapan perizinan dalam melakukan pelayaran untuk menangkap ikan di laut. Dalam pelayanan terpadu ini terdiri dari Tenaga Kesehatan, Tenaga dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Syahbandar Perikanan.

**BAB II****PERENCANAAN KINERJA****A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

**1. VISI :**

**“Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”**

**2. MISI :**

Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan mengetahui peran program yang akan dilaksanakan. Adapun misi pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir
2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya.
3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual.

4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.
5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan OPD.

### 3. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan tangkap
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir
4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya
5. Meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya
6. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan
7. Meningkatkan mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan ikan
8. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing
9. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur
10. Meningkatkan kualitas pelayanan OPD

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone.

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	68,478.5	43,878.5
	Jumlah Kelompok Nelayan	KUB	179	238
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	125.505	355.663
	Jumlah Kelompok Pembudidaya	Pokdakan	329	532

#### 4. SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran:

- Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Tujuan 2. Meningkatkan mutu hasil perikanan tangkap, dengan sasaran :

- Meningkatnya mutu hasil perikanan tangkap

Tujuan 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan sasaran :

- Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan

Tujuan 4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan

sasaran:

- Meningkatnya produksi perikanan budidaya air laut, air payau dan air tawar.

Tujuan 5. Meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya, dengan

sasaran:

- Mempertahankan kualitas penanganan pasca panen hasil perikanan

Tujuan 6. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan, dengan

Sasaran :

- Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan.

Tujuan 7. Meningkatkan mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan ikan, dengan sasaran :

- Meningkatnya mutu, dan nilai jual produk olahan ikan
- Meningkatnya keamanan produk olahan ikan

Tujuan 8. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, dengan sasaran :

- Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah illegal fishing

Tujuan 9. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dengan sasaran:

- Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Tujuan 10. Meningkatkan kualitas pelayanan OPD, dengan sasaran :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan

## OPD

- Meningkatkan ketersediaan data statistik kelautan dan perikanan yang terbaru.
- Meningkatnya ketersediaan data dan laporan kinerja OPD

Tabel 2. 2 Sasaran, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone.

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	68,478,5	43,878,5
	Jumlah Kelompok Nelayan / Kelompok Usaha Bersama ( KUB )	KUB	179	238
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	125,505	355,663
	Jumlah Kelompok Pembudidaya	Pokdakan	329	532 Pokdakan

## 5. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2. 3. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya
	Program Peberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2. 4. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap  2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah Produksi Tahun Berjalan	Renstra/L aprah
	Jumlah Kelompok Nelayan ( KUB)	KUB	Jumlah Kelompok	Renstra/L aprah
	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	Jumlah Produksi	Renstra/L aprah
	Jumlah Kelompok Pembudidaya	Pokdakan	Jumlah Kelompok	Renstra/L aprah

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel:2.5. Indikator Kinerja Utama ( IKU) Dinas kelautan dan PerikananKab

Bone Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan produksi Perikanan Tangkap	1. Jumlah Produksi Perikanan tangkap	Ton	43.878,50
		2. Jumlah Kelompok Perikanan tangkap	KUB	238
2	Meningkatnya	1.Jumlah Produksi Perikanan	Ton	355.663,00

	Produksi Perikanan Budidaya	Budidaya 2. Jumlah Kelompok Pembudidaya	Pokdakan	532

Namun telah ada Indikator Kinerja Utama untuk Tahun 2019 seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2. 6. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Prosentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	%	$\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100$	Renstra/ Laptah	Bidang Kenelayanan, Bidang pemberdayaan Usaha dan Pembudidaya ikan, Bidang Jasa Usaha Perikanan dan Bidang Sekretariat
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	2. Prosentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	%	$\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100$		
Urusan Kelautan dan Perikanan	3. Prosentase Peningkatan produksi Perikanan Budidaya	%	$\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100$		
	4. Prosentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya.	%	$\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100$		
	5. Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP ( Inspektorat Daerah)	Predikat	Nilai yang diperoleh saat dievaluasi		

**D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.10.290.287.371 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6. Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone  
TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.353.303.171	32,59
2	Belanja Langsung	6.937.184.200	67,41
<b>Jumlah</b>		<b>10.290.287.371</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
1.Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap		
		Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	40.700.000	100
2.Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Pembinaan kelompok nelayan perikanan tangkap	1.340.268.600	100

		Pembinaan ,pendampingan dan pencatatan kapal perikanan	82.100.000	93
		Pengembangan UPTD Pembinaan dan mekanisme pengelolaan perikanan tangkap	26.500.000	100
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya		
		Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	80.800.000	100
		Pembinaan dan pengembangan perikanan	1.602.820.000	100
		Pengembangan UPTD pembinaan dan mekanisme pengelolaan budidaya perikanan	273.139.000	100
		Pembinaan dan Pengembangan kemitraan usaha pembudidaya ikan	83.800.000	84
		Pembinaan sumber daya manusia pembudidaya pengolah dan pemasar ikan	62.000.000	100
		Pembinaan dan pengembangan kesehatan dan lingkungan perikanan	107.200.000	94
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air	Kajian kawasan budidaya Laut,air payau dan air tawar	956.380.000	99

	laut, Payau dan Air Tawar			
	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	356.000.000	100
		Pembinaan ijin usaha pembudidaya ikan	124.015.000	85
		Pembinaan pembudidaya ikan skala kecil	36.000.000	100
<b>TOTAL</b>			<b>5.152.922.600,-</b>	<b>100</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 5.152.922.600,- Anggaran terbesar untuk mendukung sasaran .meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan indicator jumlah pokdakan yang mendapat bantuan sarana dan prasarana produksi sebesar Rp. 1.602.820.000 atau 31 %. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran meningkatnya produk Perikanan Tangkap pada indicator Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan alat tangkap dan alat bantu dengan anggaran sebesar Rp. 1.340.268.600 atau 26,01%, disusul Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air laut, payau dan Air Tawar dengan anggaran sebesar Rp. 956.380.000 atau 18,56%, sementara indicator lain dengan anggaran yang relative kecil prosentase anggaran yang digunakan juga kecil. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan indicator jumlah nelayan yang mendapat sertifikat tanah prosentase capaian kinerjanya sebesar 200% dari target yang telah ditetapkan.

## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja target kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018
2. Membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2018, 2017 dan 2016.
3. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Tingkat efisiensi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai capaian kinerja sasaran. Analisis Efisiensi bertujuan untuk mengukur beberapa efisien penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja maka tingkat efisiensi semakin tinggi, sementara semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran maka tingkat efisiensi semakin rendah

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone Tahun 2018.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya	Produksi Perikanan	43.878,5	46.746,9	106,54
	Produksi Perikanan	Tangkap ( ton )			
	Tangkap dan	Jumlah Kelompok	238	276	115,9

.	Meningkatnya	Nelayan ( KUB)			6
	Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	355.663	356.896,65	100,3
	Budidaya	Budidaya	ton		5
		Jumlah Kelompok Pembudidaya	532	648	121,80

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Tahun 2018 dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	43.878,5	46.746,9	106.54
2.	Jumlah Kelompok Nelayan /Kelompok Usaha Bersama (KUB)	238	276	115,96
5.	Jumlah Produksi perikanan budidaya	355.663 ton	356.896,65	100,35
6.	Jumlah Kelompok Pembudidaya	532	648	121,80

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat capaian indicator kinerja utama yaitu jumlah produksi perikanan tangkap terealisasi 46.746,9 dari target 43.878,5 dengan prosentase capaian 106,54 %.

Jumlah Kelompok Nelayan (KUB) untuk tahun 2018 sebanyak 276 KUB yang terealisasi dari target 238 (KUB) dengan realisasi 115,96%. Peningkatan capaian ini didukung oleh adanya bantuan fasilitas berupa pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada kelompok nelayan yang berupa alat bantu penangkapan ikandisamping itu dengan terbinanya beberapa kelompok usaha bersama ( KUB) baik pembinaan maupun dalam bentuk sertifikat hak atas tanah nelayan, juga dilakukan pembinaan dalam bentuk peningkatan kapasitas Sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan agar mereka mampu dalam menggunakan teknologi dan informasi.

Jumlah Produksi perikanan budidaya tahun 2018 capaiannya sebanyak 356.896,65 target 355.663 ton dengan prosentase 100,35, hal ini mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan. Sementara untuk jumlah kelompok pembudidaya /pokdakan target 523 realisasi 648 pokdakan atau 121,80 %. Pembinaan Pengembangan Perikanan didukung oleh beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dengan adanya dempon /percontohan budidaya mina padi, budidaya rumput laut ,polykultur udang bandeng , selain itu dilaksanakan pembinaan dan peningkatan SDM pembudidaya ikan , pemantauan kesehatan ikan, pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (SEHATKAN) yang bias dijadikan jaminan penguatan modal pada bank.

#### **1. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA**

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang

terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

a. **Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Mutu dan Nilai Hasil Jual Perikanan Tangkap, Budidaya dan Produk Olahan Ikan**

1) **Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 1***

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
1.	Jumlah Produksi Perikanan tangkap	43.878,5 Ton	Ton46.746,9	106,54
2	Jumlah kelompok nelayan (KUB)	238	231	97
3	Produksi Perikanan Budidaya	355.663 ton	356.896,65 ton	100,35
4	Jumlah Kelompok Pembudidaya	532	648	121,80

**2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1**

Tabel 3.4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian		
		2016	2017	2018
1	Jumlah Produksi perikanan tangkap	36.400,0 ton	44.539 ton	46.746,9 ton
2	Jumlah kelompok nelayan /Kelompok usaha bersama (KUB)	226 KUB	226 KUB	276 KUB
5	Jumlah produksi perikanan budidaya	78,6 ton	322,999 ton	356.896,65 ton
6	Jumlah Kelompok Pembudidaya	562	601	648

Dari table tersebut diatas perkembangan capaian indicator kinerja sasaran dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami realisasi capaian yang semakin meningkat, hal disebabkan karena adanya dukungan kegiatan yang saling terkait dan masing-masing memberikan kontribusi pada indicator sasaran tersebut, baik dalam bentuk pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana juga dalam bentuk peningkatan SDM baik dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan baik petani/pembudidaya maupun nelayan.

## **B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA**

Sasaran 1. Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan.

Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap pada sasaran I dari target 43.875,5 dengan capaian 46.746,9 atau 106,54 % didukung dengan capaian meningkatnya fasilitas pendukung perikanan tangkap melalui pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan pada kelompok nelayan.

Jumlah kelompok nelayan (KUB) didukung dengan kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pesisir baik pembinaan yang menggunakan sertifikat hak atas tanah (sehat nelayan) maupun kegiatan yang menangani program nasional KKP yaitu asuransi nelayan yang memberikan jaminan perlindungan atas resiko kepada nelayan misalnya jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

Sasaran 2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan .

Indikator meningkatnya produksi perikanan seperti table tersebut Nampak bahwa capaian sasaran untuk produksi dan jumlah pokdakan yang ada dari tahun ketahun semakin meningkat hal ini disebabkan karena dukungan dari beberapa kegiatan yang saling mendukung, salah satu diantaranya karena adanya bantuan sarana dan prasarana yang diberikan ke pembudidaya baik yang berupa Dempon/percontohan, juga dalam bentuk pengembangan kawasan baik untuk budidaya laut, payau dan air tawar maupun dalam bentuk pembinaan berupa sosialisasi sehingga para pembudidaya mampu menerapkan sistem budidaya ikan yang baik (CBIB)

Tabel 3.5. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	2018			Target Akhir Renstra 2018	Capaian s/d Th 2018	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	%			
Meningkatnya produksi perikanan Tangkap dan meningkatnya produksi Perikanan budidaya	Produksi perikanan tangkap	68.478,5	43.878,5	46.746,9	106,54	43.878,5	46.746,9	106,54
	Jumlah kelompok nelayan/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)	179	238	276	115,96	238	276	115,96
Perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	125.505	355.663	356.896,65	100,35	356.896,65	356.896,65	100,35
	Jumlah Kelompok Pembudidaya	323	532	648	121,80	532	648	121,80

Capaian kinerja untuk Tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja yang tinggi yaitu sebesar 106,54 % dari capaian ini menyumbang 101,50 % dari target pada akhir Resntra yaitu sasaran meningkatnya produksi I perikanan tangkap budidaya. Jumlah KUB yang terbentuk pada tahun 2018 sebanyak 276 KUB dari target 238. Capaian kinerja Produksi perikanan budidaya untuk tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu 356.896,65 Ton dari target 355,66 ton, sementara jumlah pokdakan juga mengalami kenaikan dari target 532 pokdakan dapat bertambah menjadi 648 atau 121,80%. Capaian tersebut dikategorikan berhasil karena capaian kinetjanya diatas 100 % dari target yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja ini yaitu pada indikator jumlah pokdakan yang mendapat sarana dan prasarana produksi hal ini disebabkan karena banyaknya bantuan atau jumlah pokdakan yang mendapat bantuan sarana dan

prasarana semakin meningkat adanya pembinaan kelompok dan sosialisasi. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh alokasi anggaran dan kerjasama kelompok sebagai mitra untuk mencapai sasaran tersebut.

Peningkatan produksi perikanan tangkap dan jumlah kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mendapat bantuan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sehingga dengan demikian pendapatan nelayan semakin meningkat, keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran dan kerjasama dengan kelompok sebagai mitra pendamping untuk mencapai sasaran tersebut

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung tahun 2018 sebesar 96% dari total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu maka efesiansinya akan semakin rendah begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumberdaya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggaran akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi hal ini bisa dilihat bahwa realisasi anggaran lebih kecil dari pada realisasi kinerjanya. ini bisa bermakna bahwa secara umum pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai

dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil dari pada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah dari pada realisasi anggarannya, seperti pada indikator jumlah produksi benih ikan air tawar capaian kinerjanya mencapai 42 % dan untuk indikator jumlah penerbitan ijin usaha pembudidaya skala besar dari target 5 rekomendasi ditetapkan yang terealisasi 1 rekomendasi .sehingga perlu mengkaji lebih jauh faktor apa saja yang menyebabkan untuk menjawab persoalan tersebut.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program /kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.7. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1. Meningkatkan produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	43.878.5	46.746,9	106,54			
	Jumlah kelompok nelayan/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)	238	231	97			
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah penerbitan/ pencatatan tanda kapal perikanan	100	100	100	82.100000	76.100.000	93
	Optimalnya Operasional PPI/TPI	100	100	100	26.500.000	26.455	100

	Produksi perikanan budidaya	355.663	356.896.65	100,35			
	Jumlah pembudidaya/pokdakan yang didampingi melalui penguatan kelembagaan	5	5	100	80.800.000	80.800.000	100
	Jumlah pokdakan yang mendapat sarana dan prasarana produksi	20	18	90	1.592.288.000	1.592.288.000	100
	Jumlah produksi benih ikan air tawar	1.252.815	398.500	32	273.139.000	273.375.000	100
	Jumlah Pokdakan yang terlegalisasi Tanahnya	100	-	-	83.800.000	70.200.000	84
	Jumlah Pembudidaya dan Pokdakan yang terlatih	30	30	100	62.000.000	61.900.000	100
	Jumlah pembudidaya/pokdakan yang didampingi melalui pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan	5	5	100	107.200.000	101.250.000	94
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan	1	1	100	952.880.000	944.075.000	99

	pemetaan pengembangan kawasan budidaya laut, payau dan air tawar						
Meningkatkan keberdayaan masyarakat pesisir	Jumlah nelayan yang mendapat alokasi sertifikat tanah dan bermitra dengan bank	100	-	-	356.000.000	355.999.443	100
	Jumlah nelayan yang mendapat asuransi perlindungan	3000	1470	49			
	Jumlah Penerbitan pencatatan usaha budidaya pengangkut ikan hidup/asal ikan	100	118	118	36.000.000	36.000.000	100
	Jumlah penerbitan izin usaha pembudidaya skala besar (> 5 Ha)	3	1	33	124.015.000	104.912.000	85

Tabel 3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
		Produksi perikanan tangkap	106,54		
		Jumlah kelompok nelayan/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)	97		
		Jumlah Nelayn yang terlatih ( Peningkatan Kapasitas SDM)	100	100	Efisien
	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap dan Meningkatnya Perproduksi Perikanan Budidaya	Jumlah nelayan KUB yang mendapat bantuan alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	90	100	Tidak efisien
		Jumlah penerbitan/ pencatatan tanda kapal perikanan	100	100	Efisien
		Optimalnya Operasional PPI/TPI	100	100	Efisien
		Produksi perikanan budidaya	106		
		Jumlah pembudidaya/ pokdakan yang didampingi melalui	100	100	Efisien

		penguatan kelembagaan			
		Jumlah Pembudidaya dan Pokdakan yang terlatih	100	100	Efisien
		Jumlah Pokdakan yang terlegalisasi Tanahnya	-	84	Tidak Efisien
		Jumlah dokumen perencanaan dan pemetaan pengembangan kawasan budidaya laut, payau dan air tawar	100	99	Efisien
		Jumlah pokdakan yang mendapat sarana dan prasarana produksi	90	100	Tidak efisien
		Jumlah produksi benih ikan air tawar	42	100	Tidak Efisi
		Jumlah pembudidaya/ pokdakan yang didampingi melalui pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan	100	100	efisijen
	Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Jumlah nelayan yang mendapat alokasi sertifikat tanah dan bermitra dengan bank	200	96,3	Efisien
		Jumlah nelayan	49		Tidak

	yang mendapat asuransi perlindungan		200	Efisien
	Jumlah penerbitan izin usaha pembudidaya skala besar (> 5 Ha)	20		Tidak efisien T efisien
	Jumlah Pencatatan /penerbitan usaha pembudidaya skala kecil	<b>118</b>	100	Efisien

#### Analisa Efisiensi

Pada tabel tersebut di atas terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa ada 10 indikator yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %, seperti jumlah nelayan yang mendapat alokasi sertifikat tanah 200 % disusul oleh indicator jumlah produksi perikanan tangkapsebesar 106,54%, Indikator jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 100,35 % ,indicator jumlah penerbitan pencatatan tanda kapal perikanan,jumlah pokdakan yang didampingi dengan kelembagaan,jumlah pokdakan yang didampingi dengan kesehatan lingkungan. prosentase capaian kinerjanya sebesar 100%,. Dari indicator tersebut masih ditemukan adanya capaian kinerja yang tidak maksimal seperti pada indicator jumlah produksi benih air tawar yang capaian kinerjanya sekitar 42 % dan indicator jumlah penerbitan ijin usaha pembudidaya skala besar capaian kinerjanya hanya 20%

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi, hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Bila mana tingkat penyerapan anggaran lebih tinggi dari pada tingkat prosentase capaian kinerja maka tidak efisien dan bilamana prosentase tingkat capaian kinerja lebih tinggi dari pada prosentase penyerapan anggaran maka termasuk tingkat efisiensinya adalah efisien.

#### PENCAPAIAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
25.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan meningkatnya produksi perikanan biudidaya	Prosentase PAD dari sector perikanan	Rp	30	102,6	102,4	100,042
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	43.879	46.746,90	44.539,00	36.400
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	355.663	356.896,70	322.999,00	78.6

Berdasarkan table tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu prosentase PAD dari sector perikanan tahun 2018 yaitu Rp. 234.452.000 atau 102,6 % melebihi dari target yang ditetapkan, namun secara umum prosentase PAD dari sector perikanan hanya mencapai 0,11 % dari target 30 %, dimana capaian PAD Kabupaten Bone pada data sementara

214.280.897.388 atau 107,42 %. Untuk Indikator kinerja produksi perikanan tangkap tahun 2018 capaian kinerja sebesar 46.746,90 dari target 43.879 ,00 dengan prosentase 106,5 capaian ini dikategorikan baik . Keberhasilan capaian target pada indicator kinerja utama disebabkan selain usaha penangkapan ikan juga karena kelompok masyarakat Kelautan dan Perikanan /KUB mendapat sarana dan prasarana penangkapan melalui dana DAK Tahun 2018, sehingga dengan demikian pendapatan nelayan semakin meningkat. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran dan kerjasama kelompok sebagai mitra pendamping untuk mencapai sasaran tersebut.

Indikator jumlah produksi perikanan Budidaya Realisasi pada tahun 2018 mencapai 356.896,70 ton dari target 355.663 ton. Capaian ini termasuk kategori baik karena melebihi dari target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian ini karena upaya para pembudidaya /pokdakan juga disebabkan adanya bantuyuan berupa sarana dan prasarana budidaya melalui dana alokasi khusus ( DAK ) dan bantuan APBN melalui anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mendukung pencapaian indicator sasaran maka telah dilaksanakan program peningkatan produksi perikanan tangkap melalui kegiatan pembinaan kelompok nelayan perikanan tangkap dengan anggaran Rp. 1.340.440.000 dengan realisasi Rp. 1. 340.268.600, sementara dukungan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan dengan anggaran Rp. 1.592.288.000 dengan realisasi Rp. 1.592.288.000,-.

Analisis program dan kegiatan tahun anggaran 2018 yang menunjang  
pencapaian kinerja per indikator

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan dan Solusi Realisasi Anggaran (-100%)
25.	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap dan meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	1.340.440.000	1.340.440.000	100
				Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	40.700.000	40.650.000	100
				Pembinaan, pendampingan dan pencatatan kapal perikanan	82.100.000	76.100.000	93
				Pengembangan UPTD, pembinaan dan mekanisme pengelolaan perikanan tangkap	26.500.000	26.455.000	100
		Produksi perikanan budidaya	Program Perikanan Budidaya	Pembinaan Pengembangan Perikanan	1.592.288.000	1.592.288.000	100
				Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	80.800.000	80.800.000	100
				Pengembangan UPTD pembinaan dan mekanisme budidaya	273.139.000	272.375.000	100
				Pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha pembudidaya ikan	83.800.000	70.200.000	84
				Pembinaan Sumberdaya manusia pembudidaya pengolah dan pemasar ikan	62.000.000	62.000.000	100
				Pembinaan dan pengembangan kesehatan dan lingkungan ikan	107.200.000	101.250.000	94
				Kajian kawasan budidaya laut, air	952.880.000	944.075.000	99

			Program pengembangan kawasan budidaya air laut, payau dan air tawar.	payau dan air tawar - Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir	356.000.000	355.999.443	100
				- Pembinaan ijin usaha pembudidaya ikan	124.015.000	104.912.000	85
			Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	- Pembinaan pembudidaya ikan skala kecil	36.000.000	36.000.000	100

- Permasalahan dan alternatif solusi

Walaupun pencapaian kinerja sasaran Dinas kelautan dan perikanan Kab Bone Tahun 2018 tercapai, namun secara umum masih terjadi kendala atau masalah. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan sector Kelautan dan Perikanan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lemahnya kemampuan pelaku usaha dibidang kenelayan dalam kemandirian berwirausaha.
2. Masih rendahnya kemampuan berwirausaha bagi pembudidaya ikan secara berkelanjutan
2. Rendahnya legalitas berusaha bagi usaha perikanan

Tindak lanjut pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang perlu dilakukan antara lain :

1. Pembinaan, Pelatihan, dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha Kelautan dan Perikanan.
2. Perlunya penerapan untuk memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan dengan maksimal.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut dari instruksi presiden ( Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Secara umum program atau sasaran satuan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone telah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai masih perlu ditingkatkan ditahun-tahun mendatang .

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKJ bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian

tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone ke depan perlu upaya-upayah nyata agar keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dapat dicapai lebih optimal.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan

menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.



**Lampiran-lampiran :**

- Penghargaan yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2017 yaitu Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia yaitu Satya Lencana Wirakarya kepada Bapak Bupati Bone
- MOU Pemerintah Kabupaten Bone dengan BMKG
- Bukti pendukung/penunjang

